

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan perusahaan menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaannya. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya terutama investor maupun kreditor. Informasi laba merupakan fokus utama dalam pelaporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu.

Prinsip akuntansi yang berterima umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan metode maupun estimasi akuntansi yang digunakan. Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi perusahaan (Wardhani, 2008). Manajer dapat melakukan pelaporan keuangan yang optimis maupun konservatif, akan tetapi pelaporan yang optimis serta cenderung *overstate* terkadang menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan. Beberapa kasus terkait hal tersebut terjadi di luar negeri dan di

Indonesia, sering kali penyajian yang *overstate* merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh *Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission* (COSO) menyebutkan bahwa lima puluh persen (50%) dari perusahaan-perusahaan di AS yang melakukan kecurangan antara tahun 1987 sampai dengan 1997 dengan cara mencatat pendapatan yang prematur atau dengan menciptakan transaksi fiktif (Arens *et al*, 2011 dalam Indrayati, 2010). Selain itu perusahaan yang teridentifikasi melakukan kecurangan, melebihiajikan aset mereka dengan cara melebihkan penilaian aset yang ada, mencatatkan aset fiktif, atau mengkapitalisasi unsur-unsur yang seharusnya dibebankan. Hal tersebut diduga dilakukan oleh manajemen dengan maksud menghindari kerugian sebelum pajak, untuk mematuhi peraturan-peraturan agar saham perusahaan dapat diperjualbelikan di bursa saham nasional, serta meningkatkan harga saham. Motivasi tersebut dilakukan karena secara rata-rata pegawai perusahaan dan dewan direksi memiliki tiga puluh dua persen (32%) saham perusahaan (Arens *et al*, 2011 dalam Indrayati, 2010). Salah satu contoh kasus kecurangan manajemen dengan penyajian yang *overstate* ialah kasus kebangkrutan Enron Corporation di AS dan kasus kecurangan PT. Kimia Farma.

Enron runtuh pada akhir tahun 2001, keruntuhan tersebut dimulai pada Oktober 2001 ketika perusahaan tersebut mengumumkan kerugian per kuartal yang mengejutkan senilai \$618 juta, terkait dengan bisnis yang dilakukan dengan pihak

istimewa yang misterius yang juga merupakan bagian internal perusahaan. Kemudian pada November 2001, perusahaan juga mengumumkan mereka telah salah menyajikan laba sebesar hampir \$600 juta sejak tahun 1997, sehingga mereka harus melakukan penyajian ulang atas laporan keuangan yang telah diaudit sejak empat tahun sebelumnya (Arens *et al*, 2011 dalam Indrayati, 2010). Kejadian tersebut karena ada *overstate* laba, dimana penyajian 80% laba perusahaan berasal dari bisnis yang tidak jelas yang dikenal dengan “agen pemasok jasa dan operasi energi” dan sangat mencolok ketika salah seorang manajer investasi secara terbuka mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya Enron menghasilkan uang (Arens *et. al.*, 2011 dalam Indrayati, 2010).

Kasus PT. Kimia Farma merupakan salah satu bentuk kecurangan dengan penyajian yang *overstated* yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2002, terungkap kasus *mark-up* laporan keuangan PT. Kimia Farma yang lebih saji (*overstated*) laba yaitu dengan penggelembungan laba bersih tahun 2001 senilai Rp. 36,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp. 99,594 miliar ditulis senilai Rp. 132 miliar). Kasus tersebut menunjukkan kurangnya kebijakan konservatisme yang diterapkan perusahaan (Rahmawati, 2010). Kurangnya konservatisme kemungkinan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

Konservatisme merupakan konsep yang mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan keuntungan lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai terendah serta mengakui dan kewajiban dengan nilai tertinggi (Sari dan Adhariani,

2009). Prinsip konservatisme masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Terdapat banyak kritikan yang muncul, tetapi ada pula yang memberikan dukungan terhadap penerapan prinsip konservatisme. Adapun kritikan terhadap konservatisme menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi bias sehingga tidak dapat dijadikan alat pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi resiko perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian (Monahan, 1999 dalam Rahmawati, 2010) yang menyatakan bahwa semakin konservatif akuntansi maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias. Sedangkan beberapa peneliti yang mendukung penerapan prinsip konservatisme menyatakan bahwa konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watts,2003 dalam Rahmawati, 2010).

Meskipun prinsip konservatisme dapat menghindari optimisme berlebihan dari manajemen dan pemilik perusahaan, pengguna konservatisme yang berlebihan juga tidak baik dan harus dihindari. hal ini dikarenakan konservatisme yang berlebihan akan mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan dapat menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, penggunaan konservatisme harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Penerapan *corporate governance* dilakukan seluruh pihak dalam perusahaan dengan adanya dewan yang mengelola dan mengawasi kinerja perusahaan. Dalam mengawasi dan mengelola kinerja perusahaan, dewan direksi sebagai pengelola perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan di dalam

perusahaan seperti kebijakan mengenai penerapan akuntansi konservatif. Sedangkan dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja direksi dan manajer dalam hal kesesuaian tugas yang dilakukan manajemen perusahaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan dan memastikan bahwa direksi dan manajer telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Agar pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris lebih ketat maka dewan komisaris dapat membentuk komite-komite seperti komite audit, komite nominasi maupun komite kompensasi atau remunerasi.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, dewan komisaris mensyaratkan informasi yang berkualitas. Oleh karena itu dewan komisaris akan cenderung menginginkan penerapan sistem akuntansi yang konservatif. Dengan penerapan prinsip konservatisme, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dipercaya oleh investor karena konservatisme dapat menghindari pelaporan keuangan yang berlebihan. Selain itu dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hal tersebut di atas maka karakteristik dewan komisaris akan mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan di dalam perusahaan.

Karakteristik dewan komisaris terkait dengan proporsi komisaris independen perlu diperhatikan supaya terdapat independensi dalam proses pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komisaris yang independen, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan lebih ketat sehingga akan

cenderung mensyaratkan akuntansi yang konservatif untuk mencegah sikap oportunistik manajer. Perusahaan juga perlu memiliki komisaris independen yang memiliki keahlian di bidangnya agar fungsi pengawasan dapat berjalan baik. Salah satu dari dewan komisaris harus memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Besar kecilnya jumlah kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan mengidentifikasi adanya persamaan kepentingan atas manajemen dan pemegang saham. Apabila kepemilikan manajerial semakin kecil, akan mengakibatkan posisi kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen akan didominasi oleh kepentingan pemegang saham. Dalam hal ini manajemen menjadi pihak minoritas dan tidak berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memastikan proses pelaporan keuangan perusahaan termonitoring dengan baik. Komite audit juga memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan yang diambil perusahaan berhubungan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan, sehingga hal ini dapat memastikan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan secara lebih akurat dan berkualitas.

Dari sisi ukuran dewan komisaris, hal tersebut terkait dengan jumlah anggota dewan komisaris yang akan mempengaruhi mekanisme pengawasan terhadap

perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang khusus dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar tersebut dapat menunjukkan pengawasan yang lebih efektif sehingga penerapan akuntansi yang disyaratkan dewan komisaris lebih konservatif. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kompleksitas perusahaan supaya pengawasan yang dilakukan lebih efektif.

Penelitian yang menghubungkan konservatisme akuntansi dengan *Corporate Governance* belum menunjukkan hasil yang konsisten terutama di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengetahui bukti empiris bagaimana pengaruh karakteristik dewan komisaris dalam penerapan mekanisme *Corporate Governance* terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wardhani (2008). Perbedaan penelitian ini pada penelitian sebelumnya terletak pada periode pengamatan yaitu dari tahun 2003-2006 menjadi tahun 2009-2013. Penambahan periode ini dilakukan sesuai dengan saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu penulis menambahkan satu variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris untuk mengetahui apakah proporsi dari dewan komisaris berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi atau tidak.

Penulis juga mengganti pengukuran keberadaan komite audit dengan kualitas komite audit yang dilihat dari jumlah pertemuan rapat komite audit. Hal ini dikarenakan pengukuran berdasarkan keberadaan komite audit tidak dapat digunakan lagi, karena sudah ada keputusan Bursa Efek Indonesia yaitu KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komite audit dan pada saat ini hampir semua perusahaan telah memiliki komite audit. Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka dalam masalah ini penulis membatasi pada bagaimana pengaruh Good Corporate Governance yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris terhadap tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh pada tingkat terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kualitas komite audit berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap praktek konservatisme akuntansi di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktek konservatisme akuntansi di Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas komite audit terhadap praktek konservatisme akuntansi di Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis ukuran dewan komisaris terhadap praktek konservatisme akuntansi di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini bermanfaat karena dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan corporate governance terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang terkait dengan dewan komisaris.
2. Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat konservatisme akuntansi perusahaan dan penerapan corporate governance serta implikasinya bagi investor.
3. Bagi pemegang saham, kreditor maupun manajemen penelitian ini digunakan untuk menjawab apakah konservatisme akuntansi yang diterapkan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan masalah keagenan.